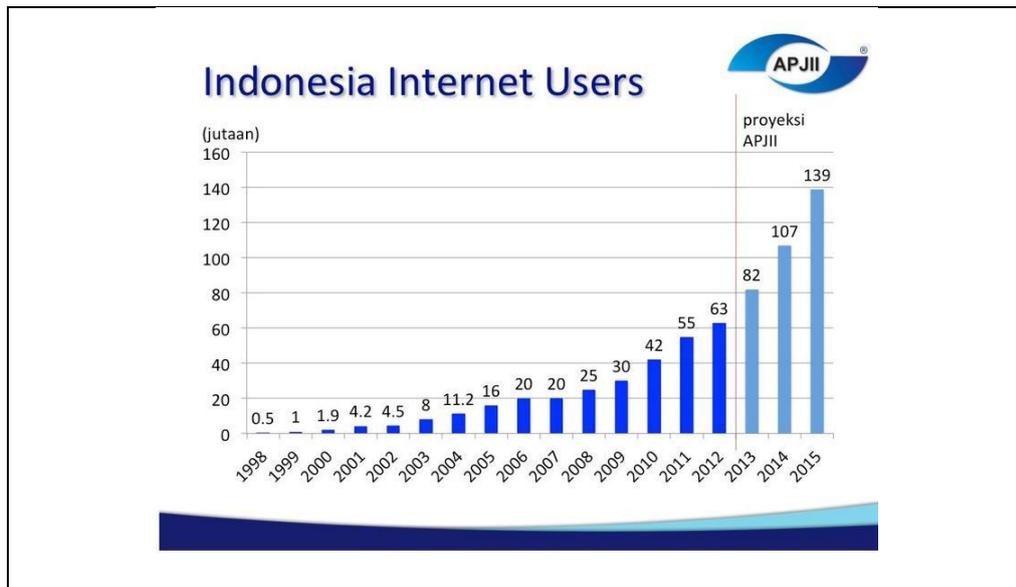


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi dan informasi berkembang begitu pesat dan hampir seluruh kalangan manusia memiliki dan memakainya, sehingga memaksa setiap manusia untuk mengikuti dan memahami perkembangan tersebut jika tidak ingin tersingkir dari persaingan pasar maupun hidup. Pertumbuhan teknologi tidak lepas dari perkembangan internet. Internet menjadi sarana dimana kita dapat memperoleh informasi dengan sangat mudah. Pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di seluruh dunia. Lembaga riset International Data Corporation (IDC) memperkirakan 2 miliar orang di seluruh dunia akan menggunakan internet lewat perangkat *mobile* pada tahun 2016 ini [1]. Berdasarkan riset dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Indonesia sendiri jumlah pengguna internet sejak 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, tahun 2013 pengguna mencapai 82 juta orang, tahun 2014 pengguna internet mencapai 107 juta orang, sedangkan tahun 2015 pengguna mencapai 139 juta orang dan di tahun 2016 ini diperkirakan jumlah pengguna internet akan semakin bertambah. Berikut adalah grafik penggunaan internet di Indonesia berdasarkan APJII dari tahun 1998 – 2015 [2]:



Gambar 1.1 Grafik peningkatan pengguna internet [2]

Pentingnya peran Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) dalam upaya meningkatkan kualitas layanan demi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik(*Good Corporate Governance*) sehingga peranan tata kelola Teknologi Informasi dalam suatu instansi penyelenggara pelayanan publik sangat dibutuhkan. Informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi seluruh instansi atau organisasi. Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK membutuhkan keamanan informasi , tanpa adanya keamanan informasi maka kinerja tata kelola TIK akan terganggu.

Bidang Sampling dan Pengujian pada Balai Besar POM Semarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas produk terapeutic, narkotika, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, makanan dan minuman, psikotropika, dan zat adiktif lain yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Seluruh kegiatan bisnis yang berlangsung pada bagian tersebut memerlukan pelaporan ke kantor pusat untuk diberikan keputusan akhir dan menyelesaikan pekerjaan. Adapun sistem informasi yang telah dipakai oleh instansi tersebut adalah Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang sudah dipakai di BBPOM seluruh Indonesia. Sistem ini berfungsi untuk melaporkan seluruh proses bisnis yang ada pada

BBPOM kota-kota di Indonesia untuk dilaporkan ke BBPOM pusat yang terletak di Jakarta [3].

Sebagian besar karyawan di lingkungan BPOM menggunakan internet untuk mengakses informasi guna menjalankan fungsinya di masing-masing divisi. Setiap karyawan divisi *Sampling* dan Pengujian memiliki akun yang dilengkapi dengan *id-user* dan *password* untuk *log-in* dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). SIPT dapat di akses oleh seluruh karyawan sesuai dengan *id-user* yang dimiliki, oleh karena itu keamanan informasi SIPT harus selalu dievaluasi guna mencegah terjadinya ancaman terhadap keamanan informasi. Untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) maka akan dilakukan evaluasi sesuai indeks KAMI yang akan dilakukan diberbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi sesuai standar SNI ISO/IEC 27001:2009 [3].

Penelitian yang terkait dengan penggunaan indeks KAMI dalam keamanan informasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdausi dengan judul “Analisis Kematangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Diukur Menggunakan Indeks Keamanan Informasi”. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, berdasarkan ditemukannya masalah terhadap peningkatan jumlah pengguna internet di BPPK sehingga mengakibatkan tingginya potensi terhadap peningkatan ancaman keamanan informasi. Hasil dari penelitian ini adalah skor rata-rata penilaian pengelolaan keamanan informasi sebesar 22 (15%) atau berada pada tingkat kematangan (TK) I+.

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan kesesuaian dengan kondisi yang pernah terjadi pada divisi *Sampling* dan Pengujian pada BPOM Kota Semarang, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “**EVALUASI TINGKAT KELENGKAPAN DAN KEMATANGAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN INDEKS KAMI PADA DIVISI SAMPLING DAN PENGUJIAN BPOM KOTA SEMARANG** “. Dari evaluasi keamanan informasi yang dilakukan maka diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan di divisi *Sampling* dan Pengujian BPOM Kota Semarang untuk meningkatkan pengelolaan data di divisi tersebut berdasarkan Standar

Nasional Indonesia (SNI) sehingga kedepannya dapat menjadi rujukan guna mewujudkan tujuan dari organisasi dengan lebih baik .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana tingkat kelengkapan dan tingkat kematangan keamanan informasi pada divisi *Sampling* dan Pengujian BPOM Kota Semarang berdasarkan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) SNI ISO/IEC 27001:2009 ?
2. Bagaimana strategi perbaikan untuk mencapai tingkat kapabilitas pengelolaan layanan keamanan informasi yang lebih baik ?

1.3 Batasan Masalah

Analisis tingkat kelengkapan dan keamanan informasi pada divisi *Sampling* dan Pengujian BPOM Kota Semarang hanya terkait pada Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) , yang terdiri dari tata kelola keamanan informasi , pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi dan keamanan informasi

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian pada SIPT bagian *Sampling* dan Pengujian BBPOM Semarang, antara lain:

1. Mengetahui tingkat kelengkapan dan keamanan informasi pada divisi *Sampling* dan Pengujian BPOM Kota Semarang.
2. Memberikan referensi strategi perbaikan yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat kematangan keamanan informasi yang lebih baik.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan serta gambaran umum mengenai pentingnya keamanan informasi serta penerapan Sistem Manajemen Informasi (SMKI) pada perusahaan.

2. Bagi Instansi

Dapat mempermudah proses perbaikan sistem agar kesalahan sistem yang ada dapat dihilangkan dengan lebih cepat sehingga kinerja instansi lebih efisien dan produktif dan perusahaan dapat meningkatkan sistem keamanan informasi sesuai standar yang telah ditetapkan.

3. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan Sistem Keamanan Informasi (SMKI) SNI ISO/IEC 27001:2009